



PEMERINTAH
PROVINSI RIAU

Rencana Kerja [RENJA] TAHUN 2020



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI RIAU**

**Jl. Jenderal Sudirman No.460, Jadirejo, Kec.
Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2020 ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada RENSTRA dan RPJMD Provinsi Riau. Diharapkan nantinya RENJA 2020 dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020 guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2020.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
PERATURAN GUBERNUR RIAU	iv
KEPUTUSAN KEPALA DINAS	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Landasan Hukum	I-11
C. Maksud dan Tujuan	I-13
D. Sistematika Penulisan	I-14
 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMINFOTIK TAHUN 2018	 II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	 II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	II-14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	II-18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-34
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	 III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD 2020.....	III-3
3.3. Program dan Kegiatan	III-4
 BAB IV PENUTUP	 IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian RENSTRA	II-8
Tabel 2.2.	Tujuan dan Sasaran RPJMD Bidang KOMINFOTIK	II-17
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD	II-17
Tabel 2.4.	Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	II-29
Tabel 2.5	Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	II-35
Tabel 3.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020	III-8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian *tujuan (comon goals)* dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD) maupun perencanaan tahunan (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima)

tahun, serta Rencana Kerja - Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja OPD Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD Tahun 2020 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024.

Tahapan dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan daerah tersebut diatur sesuai PP No 8 Tahun 2008 dan Permendagri No 54 Tahun 2010 dan diperbaharui dengan Permendagri No 86 Tahun 2017 dengan beberapa tahapan, yaitu Penyusunan Rancangan Awal, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Musrenbang, Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Rencana.

Secara hierarki penyusunan Renja OPD merupakan turunan dari penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD tersebut. Renja OPD juga diselaraskan dengan Renstra OPD yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan OPD. Rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara teknis, Renja OPD akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD/Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat empat tahapan utama dalam Penyusunan Renja OPD yakni: persiapan penyusunan Renja OPD, tahap penyusunan rancangan Renja, Pelaksanaan Forum PD dan tahap penetapan Renja OPD.

Sedangkan Tahapan dalam penyusunan Renja OPD sesuai PP No 8 Tahun 2008 melalui beberapa tahapan, yaitu : Penyusunan Rancangan Awal, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Musrenbang, Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Rencana Kerja.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2020, merupakan rencana pembangunan tahunan yang disusun untuk mencapai prioritas pembangunan seperti yang tercakup dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau pada tahun 2020. Dalam penyusunan Rancangan Renja OPD Tahun 2020, Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik Provinsi Riau melakukan inventarisir permasalahan dari hasil evaluasi renja tahun sebelumnya (evaluasi renja tahun 2018) dan memperhatikan kondisi eksisting (renja 2019) serta usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat, dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Periode 2019-2024.

Dalam rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2020, tidak terlepas dan mengacu kepada Rencana Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang fokus membangun Sektor Telekomunikasi, Tata Kelola Internet, dan Digitalisasi Siaran Televisi, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) R.I.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, Statistik, dan Persandian, meliputi:

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman.

4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

b. Urusan Statistik

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah. Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Statistik berkaitan dengan upaya perwujudan tata kelola data dan informasi yang baik, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut adalah Penyediaan data statistik daerah (kota) yang dapat dipertanggung jawabkan, aman, dan update

c. Urusan Persandian

1. Untuk urusan persandian, pengembangan layanan keamanan informasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi.
2. Terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif dengan strategi pembangunan menyusun kebijakan tata kelola keamanan informasi dan melakukan penguatan kelembagaan pelaksana urusan persandian.

3. Meningkatnya Kesadaran keamanan informasi dengan literasi yang inovatif dan terukur dalam membangun budaya keamanan informasi.
4. Meningkatnya kompetensi dan kinerja sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan informasi yang berorientasi pada kesiapan pelaksanaan layanan keamanan informasi secara mandiri
5. Terwujudnya layanan keamanan informasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi kepada pengguna
6. Terwujudnya harmonisasi, sinkronisasi dan konsolidasi pelaksanaan urusan persandian
7. Terwujudnya fungsi monitoring, evaluasi dan audit keamanan informasi yang handal dan professional.

**PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI PADA PEMERINTAH DAERAH**



Sedangkan Tugas dan Fungsi Urusan Persandian di Daerah, seperti bagan berikut:



Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 4 November 2016 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau.

Dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau pada tahun 2020, mengacu pada tema pembangunan Provinsi Riau 2020, terdapat 4 (empat) prioritas pembangunan serta isu strategis daerah yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Transparansi dan Cakupan Layanan Informasi;
- 2) Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Satu Data;
- 3) Peningkatan Pengamanan Informasi;
- 4) Peningkatan keamanan informasi khusus dan untuk kalangan terbatas dan peningkatan kegiatan capacity building berupa pendidikan dan latihan terkait dengan persandian;

Dengan adanya sistem satu data diharapkan adanya keterbukaan informasi serta di dukung dengan pengaman informasi sehingga masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan

Dalam mewujudkan sasaran strategis, ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah dipusatkan pada sektor infrastruktur jaringan yang menjangkau hingga ke daerah, sehingga masyarakat dapat mengakses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan layanan aparatur kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien serta dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Globalisasi ekonomi masyarakat melalui peningkatan tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman dengan promosi produk masyarakat daerah melalui sarana publik di media yang difasilitasi baik oleh pemerintah provinsi yang berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi berdaya saing serta kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan informatika, maka perumusan kegiatan dalam Renja Tahun 2020 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
2. Penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
3. Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;

4. Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah;
5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
6. Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) / *e-government*.

Untuk peningkatan pelayanan statistik sektoral di daerah, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan Renja Tahun 2020 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan untuk penyediaan data statistik sektoral;
2. Menyelenggarakan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
3. Melakukan analisa data statistik sektoral;
4. Melakukan penyajian data statistik sektoral;
5. Melakukan diseminasi data statistik sektoral;
6. Penyediaan peralatan infrastruktur;
7. Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta ukuran-ukuran; dan
8. Pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.

Sedangkan urusan persandian untuk pengaman informasi pemerintah daerah, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 supaya memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan persandian untuk pengamanan informasi;
2. Pengelolaan informasi berklasifikasi;
3. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
4. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
5. Pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaring komunikasi sandi;
6. Pelaksanaan operasional pengelolaan pengamanan komunikasi sandi; dan
7. Pengawasan dan evaluasi tata kelola, pengelolaan sumber daya persandian, dan operasional pengamanan informasi;

Selain dari pada itu, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk urusan persandian adalah sebagai berikut:

- a. Peralatan Persandian (Palsan) *jammer* (pengacak frekuensi) diprioritaskan kepada provinsi berdasarkan prioritas hasil pemetaan melalui mekanisme pinjam pakai oleh Badan Siber dan Sandi Negara; dan
- b. Dukungan APBD untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman di pusat.

Pelayanan dapat dijangkau dengan mudah merupakan inti dari pemangkasan birokrasi melalui media broadband nasional, internet dan penyiaran digital merupakan salah satu jalan menuju reformasi dapat

menciptakan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan guna mencapai good government dan clean government.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2020 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada tahun 2020.

1.2 LANDASAN HUKUM

Berikut landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2020 :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 juncto Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2020;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2108 Nomor: 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2109 Nomor : 3) ;
13. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan penyusunan renja adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan tugas, program, dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2020.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan renja OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah:

- Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2020 bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam melaksanakannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Riau .
- Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMINFOTIK PROVINSI RIAU TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMINFOTIK PROVINSI RIAU TAHUN 2018

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra OPD.

Evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kualitatif, sedang data kuantitatif merupakan proses dari pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Akuntabilitas adalah suatu peningkatan dari rasa tanggung jawab, suatu yang lebih tinggi mutunya dari suatu tanggung jawab sehingga memuaskan atasan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dari evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada tahun 2018 terhadap 2 indikator yang menjadi acuan kinerja, yaitu Indeks e-Government atau Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Nilai Keterbukaan Informasi, didapat hasil penilaian:

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Nilai Indeks	Nilai Indeks	Lembaga Penilai
1.	Indeks e-Government (SPBE)	2,65	3,02 (Baik)	Kementerian Pendayagunaan Aparatura Negara-Reformasi Birokrasi
2.	Indeks Keterbukaan Informasi	44,50	45,43	Komisi Informasi Pusat

Untuk Indeks SPBE, terdapat unsur/indikator penilaian, yaitu:

1. Domain Kebijakan SPBE, terdiri dari unsur :
 - a. Kebijakan Tata Kelola SPBE;
 - b. Kebijakan Layanan SPBE;
2. Domain Tata Kelola, terdiri dari unsur :
 - a. Kelembagaan;
 - b. Strategi dan Perencanaan;
 - c. Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Domain Layanan SPBE, terdiri dari unsur :
 - a. Administrasi Pemerintahan;
 - b. Pelayanan Publik;

Dari hasil penilaian yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatura Negara-Reformasi Birokrasi R.I. (Kemenpan-RB), dapat dijelaskan kekuatan dan kelemahan:

1. Kebijakan Tata Kelola

- Kekuatan

Pemerintah Provinsi Riau sudah memiliki Kebijakan Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah dan Kebijakan Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi,

dalam hal ini ada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Informasi dan Keterbukaan serta Peraturan Gubernur Riau Nomor Kpts.357/V/2018 tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal SPBE Provinsi Riau.

- Kelemahan

Kebijakan informal terkait rencana induk SPBE masih dalam proses. Kebijakan internal tentang pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK masih memuat sebagian dari rencana SPBE.

2. Kebijakan Layanan

- Kekuatan

Kebijakan layanan Manajemen Kinerja telah mendukung kebutuhan integrasi sistem. Ada SK Pergub No 8 Tahun 2018 tentang Sistem Penilaian kinerja aparatur elektronik (e-SIKAP) di Pemprov Riau. Sudah terintegrasi dengan Smart-ASN.

Kebijakan sudah mendukung kebutuhan integrasi sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH). Pergub no KPTS 654/VI/2015 tentang pembentukan tim pengelolaan website jaringan dokumentasi dan informasi hukum Prov Riau.

- Kelemahan

Kebijakan internal terkait Whistle Blowing System (WBS) belum ditetapkan.

3. Kelembagaan

- Kekuatan

Prov Riau sudah memiliki Tim pengarah SPBE yang ditetapkan dan telah melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya, dipantau dan dievaluasi secara berkala.

- Kelemahan

Proses bisnis SOP yang tertuang dalam dokumen masih diterapkan pada sebagian unit kerja.

4. Strategi dan Perencanaan

- Kekuatan

Prov Riau mempunyai perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada unit Pengelola TIK

- Kelemahan

Dokumen rencana induk SPBE Prov Riau masih mencakup sebagian dari visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE (arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur keamanan), dan peta jalan SPBE.

5. Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Kekuatan

Kinerja aplikasi umum berbagai pakai di lingkungan Prov Riau sudah dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

- Kelemahan

Prosedur pengoperasian baku pusat data (data center) dan integrasi sistem aplikasi masih diterapkan oleh sebagian unit kerja.

6. Administrasi Pemerintahan

- Kekuatan

Layanan Manajemen Penganggaran, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Manajemen Kinerja, dan Layanan Pengadaan di lingkungan Prov Riau sudah mendukung fitur layanan transaksi dan kolaborasi.

- Kelemahan

Layanan Naskah Dinas , Layanan Manajemen Kepegawaian, Layanan Manajemen Perencanaan belum menyediakan layanan kolaborasi dengan layanan aplikasi lain.

7. Pelayanan Publik

- Kekuatan

Layanan Pengaduan Publik dan Layanan Dokumentasi & Informasi Hukum di lingkungan Prov Riau sudah mendukung fitur layanan transaksi dan kolaborasi

- Kelemahan

Aplikasi WBS belum menyediakan layanan kolaborasi dan belum diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE lain.

Sedangkan penilaian tentang Keterbukaan Informasi yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat, masih terdapat catatan yang perlu untuk ditingkatkan, yaitu :

1. Adanya struktur organisasi PPID;
2. Adanya ringkasan layanan informasi publik yang berisi jumlah pemohon yang diterima, waktu yang diperlukan dalam pemenuhan permohonan informasi publik, dan lain sebagainya;
3. Disediakan informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan;

4. Perlu pengembangan kanal PPID yang terhubung dengan situs utama serta media sosial khusus PPID guna penyebaran informasi publik;
5. Pengembangan aplikasi layanan PPID berbasis mobile (android, linux, apple, dan lain sebagainya);
6. Pengumuman tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi pada kanal PPID;
7. Pengembangan aplikasi/tool yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan permohonan keberatan secara online;

Evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kualitatif, sedang data kuantitatif merupakan proses dari pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan.

Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri, walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri.

Berikut ini dipaparkan beberapa tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan.

- Menentukan apa yang akan dievaluasi. Dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program kerja. Di sana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi, umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi *key-success factors*-nya.
- Merancang (desain) kegiatan evaluasi. Sebelum evaluasi dilakukan, harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.

- Pengumpulan data. Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- Pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara Fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan disesuaikan dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.
- Pelaporan hasil evaluasi. Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis.

Berkaitan dengan Evaluasi Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2018 yang mempertimbangkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2020 merupakan Renja Tahun Pertama dalam periode Renstra 2019-2024, maka berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pengisian Tabel III.1 tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sampai dengan tahun berjalan mencantumkan program dan kegiatan, indikator kinerja program serta target akhir periode Renstra OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2020.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2020 Provinsi Riau
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 - 2019 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2018			Target program/ kegiatan RKPD tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target RKPD tahun 2018	Realisasi RKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2019 (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang dikirim	5,410 surat	1450	1500	1500	100	160	3110	57,49	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	48 bulan	12	12	12	100	12	36	75	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara.	47 unit	16	18	12	66,67	14	42	89,36	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
0	0	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga dan jenis bahan kebersihan kantor yang disediakan	60 bulan	12	12	12	100	12	36	60	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	waktu penyediaan alat tulis kantor	60 bulan	12	12	12	100	12	36	60	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	rentang waktu penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	60 bulan	12	12	12	100	12	36	60	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	waktu penyediaan komponen instalasi listrik	60 bulan	12	38	38	100	12	62	103,33	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
0	0	1	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan	33,401 kotak	5963	100	100	100	8590	14653	43,87	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	5 kali	99	12	12	100	67	178	3560	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
0	0	1	23	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Tidak Tetap/K2	10 orang	2	2	2	100	2	6	60	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
0	0	1	110	Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah barang barang milik daerah diskominfotik	3 dokumen	0	-	-	-	3	3	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 - 2019 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2018			Target program/ kegiatan RKPD tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target RKPD tahun 2018	Realisasi RKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2019 (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
0	0	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 unit	1	5	5	100	4	10	200	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
0	0	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	519 unit	111	300	180	60	144	435	83,82	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
0	0	2	80	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	85 Unit	19	100	15	15	3	37	43,53	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
0	0	2	199	Penyediaan Sarana Kearsipan	jumlah jenis sarana kearsipan	1,682 jenis	0	-	-	-	6	6	0,36	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
0	0	5	1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta diklat	81 orang	32	-	-	-	4	36	44,44	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
0	0	5	12	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah ASN yang dibina fisik dan Mental	313 orang	60	81	81	100	70	211	67,41	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
0	0	5	20	Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah peserta upacara Harkitnas	8,447 orang	1500	2947	2500	84,83	1000	5000	59,19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 - 2019 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2018			Target program/ kegiatan RKPD tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
0	0	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
0	0	6	5	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan	318 eksp	55	-	-	-	1	56	17,61	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
0	0	6	6	Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Jumlah peserta Rapat Koordinasi	310 orang	2	70	70	100	0	72	23,23	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
0	0	6	30	Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD	jumlah dokumen	60 eksplr	0	-	-	-	1	1	1,67	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
0	0	6	120	Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD dan PPKD	jumlah laporan keuangan opd dan ppkd	2 dokumen	0	-	-	-	5	5	250	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
1	10			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	10	17		Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi										
1	10	17	3	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah kelompok informasi yang dibina	411 Kelompok	60	21	5	23,81	30	95	23,11	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
1	10	17	23	Layanan Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau	Semakin Berkualitasnya siaran TV dan Radio di Kab/Kota sesuai dengan prinsip P3SPS	1 Tahun	0	1	0	0	-	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
1	10	17	24	Pembinaan Pemahaman Aparatur Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Aparatur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang memahamiketerbukaan infromasipublik	150 Orang	0	150	30	20	-	30	20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
1	10	17	25	Forum Pengelola Media Center Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan forum pengelola media center	12 kab/kota	0	12	0	0	-	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
1	10	17	26	Layanan Informasi Melalui Media Center	-	0	0	60	0	0	-	0		pindah ke Program Pengembangan Data/Informasi
1	10	17	27	Pengelolaan Sumber Daya Persandian di Pemerintah Daerah	Jumlah tenaga teknis persandian	12 orang	0	-	-	-	12	12	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 - 2019 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2018			Target program/ kegiatan RKPD tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target RKPD tahun 2018	Realisasi RKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2019 (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	10	17	28	Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan atas Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	Pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMMI)	1 dokumen	0	-	-	-	1	1	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
1	10	17	29	Penyelenggaraan Kontra Penginderaan Untuk Pengamanan Informasi Pimpinan di Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi yang di assesment dan pengamanan informasi pada objek vital di lingkungan pemerintah daerah	26 aplikasi dan titik	0	-	-	-	26	26	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
1	10	18		Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa										
1	10	18	7	Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi	Jumlah aktivitas kemitraan dengan lembaga komunikasi	236 kali	15	-	-	-	1	16	6,78	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
1	10	18	16	Dialog Interaktif Melalui Media Televisi Lokal	Jumlah dialog di televisi lokal	80 kali	13	6	2	33,33	31	46	57,50	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
1	10	19		Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika										
1	10	19	1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah Provinsi Riau	jumlah sarana dan prasarana perangkat jaringan pemerintah provinsi riau	43 jaringan	51	-	-	-	1	52	120,93	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
1	10	19	2	Pengelolaan Bandwidth Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah bandwidth dedicated dan broadband up to akses internet	2,350 Mbps	500	500	500	100	350	1350	57,45	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
1	10	19	10	Pengembangan dan Pengelolaan Comman Center Provinsi Riau	jumlah command center yang dikelola	1 unit	0	-	-	-	1	1	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
1	10	19	12	Pengelolaan Data Center Pemerintah Provinsi Riau	Data yang terintegrasi dan bebrbagi pakai OPD di Pemprov Riau Hingga Kab/Kota se Prov Riau	146 data center	0	1	1	100	-	1	#REF!	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
1	10	19	13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah Provinsi Riau	jumlah sarana dan prasarana perangkat jaringan pemerintah prov riau	153 jaringan	0	51	51	100	-	51	33,33	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 - 2019 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2018			Target program/ kegiatan RKPD tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target RKPD tahun 2018	Realisasi RKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2019 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	10	20		Program Pengembangan Aplikasi Informatika											
1	10	20	1	Pengembangan e-verment Provinsi Riau	tersediannya layanan aplikasi yang generik dan non generik	215 aplikasi/orang	1	46	46	100	4	51	23,72	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
1	10	20	8	Pengembangan dan Pengelolaan Command Center Provinsi Riau	jumlah sarana infrastruktur command center	1 command center	0	1	1	100	-	1	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
1	10	21		Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik											
1	10	21	1	Pengelolaan website riau..id	Badan publik yang menyediakan layanan kominfo	3 website	1	-	-	-	1	2	66,67	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
1	10	21	6	Layanan Informasi melalui media center	Jumlah bilik media center yang dikelola/jumlah website media center yang dikelola	8 bilik	6	-	-	-	2	8	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
1	10	21	7	Newsroom pemerintah provinsi riau	Jumlah berita yang dipublikasikan melalui website	25,424 berita	8500	-	-	-	2640	11140	43,82	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
1	10	21	8	Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau	Jumlah pameran yang dilaksanakan	5 Kali	2	1	1	100	1	4	80	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
1	10	21	10	Peliputan acara dan dokumentasi kegiatan pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Acara Yang didokumentasikan	450 acara	100	100	100	100	150	350	77,78	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
1	10	21	11	Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau	Pelayanan terhadap penyelesaian sengketa informasi	5 bulan	12	12	12	100	40	64	1280	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
1	10	21	17	Penguatan Kelembagaan KIP Serta Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	jumlah publikasi kelembagaan KIP	50 publikasi	30	130	0	0	260	290	580	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 - 2019 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2018			Target program/ kegiatan RKPD tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target RKPD tahun 2018	Realisasi RKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2019 (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	10	21	19		Pengembangan TV dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Media Streaming yang dikembangkan	2 media	0	0	0	2	2	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
1	10	21	27		Pengembangan TV dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Media Streaming yang dikembangkan	4 Media	0	2	2	-	2	50,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
1	10	21	28		Pembinaan PPID di Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan	70 unit/kab/kota	0	40	40	78	118	168,57	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
1	10	21	29		Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Ajudikasi/Mediasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan mediasi	35 kab/kota	0	11	11	-	0		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
1	10	21	32		Pembinaan Pemahaman Aparatur Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Aparatur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang memahami keterbukaan informasi publik	200 orang	0	-	-	200	200	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kebijakan nasional pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika diarahkan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut maka sesuai dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

- a. terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung focus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
- b. tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
- c. terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
- d. terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok

dan fungsi SKPD. Pada Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah telah dituangkan dalam UU Nomor 11 tahun 2008, yaitu tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu untuk menindaklanjuti UU Nomor 11 tahun 2008 tersebut Pemerintah Provinsi Riau berkewajiban untuk mengamankan informasi yang dikelola agar nantinya validasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat terjaga.

Dalam penyebaran informasi di Provinsi Riau mempunyai tantangan tersendiri, belum semua desa terjangkau sarana informasi yang memadai. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam membangun akses komunikasi dan informasi ke desa-desa dilakukan dengan memberdayakan Lembaga Komunikasi Sosial yang diantaranya melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Keberadaan KIM adalah sebagai simpul komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang berperan sebagai penyebar (*disseminator*) informasi kepada masyarakat. Dikarenakan melalui media ini, masyarakat akan lebih mudah menerima dan menyerap informasi.

Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah:

Prioritas Pembangunan	Kinerja	Target 2020	Program Prioritas	Ket.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	3,17	Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	
			Program Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	

			Program Penyelenggaraan Persandian	
			Program Penyelenggaraan Statistik	

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Provinsi Riau Tahun 2017 dan 2018, serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang dihadapi Provinsi Riau pada Tahun 2020, maka Pemerintah Provinsi Riau menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dengan target 3,17%

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Diskominfo Provinsi Riau untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pembangunan dari sisi komunikasi, informatika statistik dan persandian yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Kominfo Provinsi Riau, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Diskominfo Provinsi Riau ke depan, baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) Diskominfo Provinsi Riau itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019–2024.

Adapun Tujuan dan Sasaran RPJMD yang didukung pencapaiannya oleh indikator kinerja Diskominfo Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD yang terkait Bidang Kominfotik

Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi	
Tujuan	Sasaran
1. Peningkatan penerapan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang unggul	1. Peningkatan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan	2. Peningkatan kualitas sarana prasarana teknologi informasi dalam pemerintahan

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Diskominfo Provinsi Riau yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2019–2024 dapat diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2018.

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2018 n-2	Tahun 2019 n-1	Tahun 2020 n	Tahun 2021 n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi			3,17	3,25	3,33	3,42	3,02	-	3,17	3,25	Merupakan Tahun Pertama RPJMD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau

Sesuai dengan penjabaran RPJMD 2019-2024, bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau mempunyai indikator kinerja utama adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan upaya-upaya maksimal dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD dan RPJMD yang berkaitan dengan :

2.3.1 Kebijakan Pembangunan Komunikasi dan Informatika:

1. Menyusun aturan (Pergub) agar master plan e-gov menjadi acuan seluruh OPD untuk membangun Teknologi Informasi (TI) agar terintegrasi dan memudahkan pengelolaannya.
 - Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik, ini merupakan komitmen pemerintah untuk mengembangkan e-government. Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau menjadi sandaran berpijak bagi Diskominfo untuk berinovasi mengembangkan TI di Pemerintah Provinsi Riau.
 - Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan;
 - Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang pedoman Pengelolaan Aplikasi Perkantoran Secara Elektronik (*e-Office*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

2. Penyusunan kebijakan/aturan tata kelola TI, uraian jabatan dan tugas organisasi pengelola TI dan pemenuhan kebutuhan SDM untuk mengelola layanan TI dengan baik.
3. Membangun aplikasi yang dapat mengintegrasikan aplikasi-aplikasi di seluruh OPD. Diskominfotik Provinsi Riau telah menggunakan aplikasi mantra yang dibangun oleh kemkominfo yang dapat mengintegrasikan aplikasi-aplikasi di seluruh OPD dan kabupaten/kota di Provinsi Riau.
4. Membuat Surat Edaran Gubernur Riau dan memberikan pelatihan kepada seluruh OPD untuk penggunaan e-office di setiap OPD Provinsi dan Kab/kota se Provinsi Riau dengan Surat Edaran Nomor 555/Diskominfotik.UP/III/2015/55.04, perihal Penerapan e-government Pemerintah Provinsi Riau.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran, Diskominfotik Provinsi Riau turun langsung ke OPD yang mengalami gangguan berkaitan dengan penggunaan aplikasi e-office.
5. Menyajikan data/informasi yang bermanfaat melalui website Pemprov Riau dan OPD dengan menyediakan situs yang kontennya menyangkut pembangunan dan potensi Provinsi Riau yaitu website riau.go.id, diskominfotik.go.id, mediacenter.riau.go.id, infopublik.riau.go.id dan ppid.riau.go.id. sebagai media informasi bagi masyarakat Riau khususnya dan masyarakat di seluruh indonesia umumnya.
6. Penyediaan sarana dan prasarana TIK bagi masyarakat.

Melalui sebuah wadah bilik media center disediakan jaringan internet yang gratis bagi masyarakat yang berkunjung di bilik ini. Tahun 2018 jumlah pengunjung tercatat mencapai 6.375 orang pengunjung. Para awak media dari beberapa media baik media cetak maupun media online dapat mengupload berita melalui bilik ini. Seperti wartawan dari media, nusapos.com, potretnews.com, CNN indonesia, bermadah.com, sigap.com, genius, narapos, riaupos, haluan riau, rtv, dan radar.

7. Peningkatan peran media massa dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat dengan media TV streaming.riau.go.id dan radio. Menyediakan pelayanan informasi melalui media televisi dan radio yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat Provinsi Riau. Media ini notabene peningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pendekatan kelompok informasi masyarakat (KIM) yang terdiri didalamnya UKM media sebagai ajang promosi produk masyarakat lokal. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang telah dibina oleh Diskominfo Provinsi Riau sebanyak 42 kelompok, mereka sudah terdaftar secara nasional namun masih ada di Kabupaten yang belum terdaftar dan baru mulai didata oleh Diskominfo.
8. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat melalui pelatihan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
9. Integrasi yang telah dilakukan pada Bidang Statistik adalah pada Aplikasi Sistem Database Dukungan Kebijakan Daerah (SDDKD) Pemprov Riau Bersama dengan Sistem Database Dukungan

Kebijakan Nasional (SDDKN) Sekretariat Negara RI yang mana telah terlebih dahulu terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri. Integrasi menggunakan aplikasi MANTRA dari Kominfo Jakarta melalui jalur Government Service Bus (GSB) milik Pemprov Riau dengan Kominfo Jakarta. Integrasi dilakukan pada field-field data yang sama antara SDDKD dengan SDDKN yaitu sebanyak 1139 field data, dan 512 data yang sama antara SDDKN dengan SIPD.

10. Inventarisasi Kebutuhan Komunikasi Jaring Sandi



2.3.2 Permasalahan dan Hambatan :

1. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berbasis internet saat ini sudah semakin meningkat. Oleh karena itu yang menjadi isu terkini adalah pentingnya dilakukan kegiatan kampanye penggunaan internet sehat dan benar, peningkatan web security terhadap konten-konten pornografi dan kekerasan.

2. Belum optimalnya pengelolaan persandian dalam rangka pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Riau.
3. Belum tersedianya sumber daya manusia yang berdaya saing untuk mendukung sistem teknologi informasi. Isu strategisnya adalah peningkatan kegiatan *capacity building* berupa pendidikan dan latihan.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.
5. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur di bidang TIK.
6. Keterbatasan kapasitas SDM pengelola informasi dan sarana prasarana komunikasi.
7. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi.
8. Belum adanya dorongan dan upaya secara optimal untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik.
9. Masih rendahnya komitmen pimpinan badan publik mengenai pentingnya peran PPID.
10. Kurangnya komitmen dari setiap OPD dan instansi lainnya dalam meningkatkan produksi data sektoral.
11. Perlu adanya blueprint penyediaan data sektoral pada setiap OPD dan instansi lainnya.
12. Perlunya optimalisasi peningkatan sumber daya aparatur dalam menganalisis, mengolah, dan menyajikan data dan informasi statistik sektoral dan geospasial tematik.

13. Belum adanya penanggungjawab pengelola data sektoral di setiap OPD dan instansi lainnya yang bertugas mewakili dan bertanggungjawab dalam penyediaan data.
14. Kebutuhan akan data khususnya data statistik sektoral sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung proses perencanaan secara sektor.

2.3.3 Isu-isu penting yang akan dihadapi dalam kurun waktu 2019-2024, antara lain:

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi Perangkat Daerah, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan Perangkat Daerah dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah.

Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik.

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap RTRW, KLHS, Renstra Kementerian/Lembaga/Renstra Perangkat Daerah provinsi.

Sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program dan kegiatan, yakni:

1. Percepatan pelaksanaan e-government di OPD Pemprov Riau melalui penyediaan infrastruktur TIK, SDM, dan Aplikasi. Dengan telah menjalankan kebijakan pembangunan Diskominfo Provinsi Riau di berbagai sektor program untuk percepatan perkembangan isu-isu yang menyangkut e-government di OPD Pemprov Riau.
2. Penyediaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan telah dibangunnya aplikasi lapor.riau.go.id, dan PPID.riau.go.id yang dapat menampung aspirasi dan pusat informasi masyarakat.
3. Optimalisasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh badan publik.
4. Pengembangan aplikasi rumah data sebagai wadah inovasi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi statistik sektoral dan spasial yang dapat diakses oleh para pihak serta dapat meningkatkan layan publik yang optimal.

Dengan menjalankan kebijakan program dan kegiatan pembangunan Diskominfotik Provinsi Riau tahun 2020 di berbagai sektor, maka percepatan penyelesaian isu-isu yang menyangkut e-government di OPD Pemprov Riau, dapat teratasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada. Dokumen perencanaan daerah terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),

Rencana Kerja OPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen perencanaan tersebut merupakan dasar dalam melaksanakan program / kegiatan pembangunan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau melakukan review terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2020. Berdasarkan hasil review tersebut, ternyata ada beberapa kegiatan yang perlu diakomodir dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2020. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Riau yang memiliki korelasi langsung terhadap akselerasi pencapaian visi dan misi yang telah digariskan. Hal ini tentunya sesuai dengan dinamika perkembangan kemajuan TIK dan tuntutan masyarakat akan pelayanan birokrasi yang semakin baik, cepat dan transparan.

Sebagai provinsi yang menjadi pusat perekonomian pada tahun 2020, Provinsi Riau akan mempersiapkan infrastruktur, mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan dan ramah lingkungan, pembangunan kawasan perkotaan, pembangunan kawasan perdesaan, penanganan berbagai dampak dan isu pemanasan global, memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa datang.

Di samping itu, pemerintah Provinsi Riau memperhatikan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat melalui pembangunan infrastruktur perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui partisipasi masyarakat dengan melibatkan pelaku usaha.

Perhatian pemerintah adalah pengembangan Sumber Daya Manusia, agar bermakna dan berkembang ke arah lebih baik dan mempunyai daya saing dengan daerah lain, mempermudah akses memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan pengembangan manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi. Juga kemudahan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan sarana dan prasarana masyarakat beragama, seni budaya dan moral.

Selanjutnya, pemerintah Provinsi Riau tetap memperhatikan keikutsertaan dan peran pihak swasta dalam pembangunan perekonomian percepatan investasi dan stabilitas pembangunan ekonomi melalui penciptaan rasa aman, kepastian hukum, percepatan pelayanan perizinan usaha, penyiapan infrastruktur serta sarana dan prasarana dasar.

Di sisi lain, aparat pemerintah Provinsi Riau harus berkemampuan, profesional, bermoral serta keteladanan pemimpin, melalui penguatan kelembagaan dan kualitas aparat, untuk pencapaian kehidupan yang sejahtera bertata kehidupan dan penghidupan, baik materil maupun spritual bagi setiap masyarakat.

Misi pembangunan Provinsi Riau untuk 5 tahun kedepan, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah misi ke 5 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi**, dengan tujuan peningkatan kinerja ASN pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Provinsi Riau dalam kurun waktu lima tahun ke depan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah sasaran yang ke 2 pada Misi ke 5, yaitu **Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi**.

Program Unggulan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Misi ke lima ini yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah : **Program Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)**. Oleh sebab itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dituntut untuk dapat mewujudkan misi tersebut, untuk mencapai misi tersebut di atas tidak lepas dari dukungan tata pemerintahan yang handal dan kerjasama lintas sektor lingkup pemerintah Provinsi Riau, sehingga dapat menciptakan tatakelola yang handal, perlu melakukan terobosan melalui kinerja yang

dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi akuntabel untuk mewujudkan pembangunan di Provinsi Riau.

Oleh karena itu perlu komitmen dan kompetensi SDM bidang teknologi informasi melalui peningkatan kualitas SDM aparaturnya.

**Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020
Provinsi Riau**

OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	2.577.684.445	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	2.577.684.445	
1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Pekanbaru	Jumlah Surat yang Dikirim	160 Surat	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Pekanbaru	Jumlah Surat yang Dikirim	160 Surat	10.000.000	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru	Jumlah rekening yang dibayar	12 Rekening	531.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru	Jumlah rekening yang dibayar	12 Rekening	531.000.000	
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16 Unit	82.200.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16 Unit	82.200.000	
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	115.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	115.000.000	
5.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	pekanbaru	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	18 Unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	pekanbaru	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	18 Unit	200.000.000	
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota pekanbaru	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	37 Jenis	250.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota pekanbaru	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	37 Jenis	250.000.000	
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	22 Jenis	105.606.580	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	22 Jenis	105.606.580	

8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	25.000.000	
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	kota pekanbaru	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	9500 Porsi	284.352.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	kota pekanbaru	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	9500 Porsi	284.352.000	
10.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Riau	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	160 Kali	689.984.115	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Riau	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	160 Kali	689.984.115	
11.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Pekanbaru	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	48 OB	168.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Pekanbaru	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	48 OB	168.000.000	
12.	Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Dinas Komunikasi, Informatika, dan statistik Provinsi Riau	Jumlah Peserta Harkitnas	1000 orang	58.251.750	Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Dinas Komunikasi, Informatika, dan statistik Provinsi Riau	Jumlah Peserta Harkitnas	1000 orang	58.251.750	
13.	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Provinsi Riau dan kab/kota se-Provinsi Riau	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	100 Persen	58.290.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Provinsi Riau dan kab/kota se-Provinsi Riau	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	100 Persen	58.290.000	
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100 Persen	160.000.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100 Persen	160.000.000	
1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	4 Ruang	55.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	4 Ruang	55.000.000	
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	kota pekanbaru	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	142 Unit	105.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	kota pekanbaru	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	142 Unit	105.000.000	
III.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Persentase Tingkat Kehadiran ASN	100 Persen	70.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Persentase Tingkat Kehadiran ASN	100 Persen	70.000.000	

1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pekanbaru	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	100 Stel	70.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pekanbaru	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	100 Stel	70.000.000	
IV.	PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Persentase Sistem Informasi dan Aplikasi yang dikelola	75 Persen	805.903.000	PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Persentase Sistem Informasi dan Aplikasi yang dikelola	75 Persen	805.903.000	
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan dan Data Center	Kota Pekanbaru	Jumlah Data Center yang Dikelola	11 unit	299.488.000	Pegelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan dan Data Center	Kota Pekanbaru	Jumlah Data Center yang Dikelola	11 unit	299.488.000	
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Command Center	Kota Pekanbaru	Jumlah Command Center yang dikelola	1 Unit	332.304.000	Pengelolaan dan Pengembangan Command Center	Kota Pekanbaru	Jumlah Command Center yang dikelola	1 Unit	332.304.000	
3.	Pembinaan Kemitraan Kelompok Informasi Masyarakat dan Pelibatan Komunitas Masyarakat dalam Keterbukaan Informasi	12 Kabupaten Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Memahami Keterbukaan Informasi	80 Orang	174.111.000	Pembinaan Kemitraan Kelompok Informasi Masyarakat dan Pelibatan Komunitas Masyarakat dalam Keterbukaan Informasi	12 Kabupaten Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Memahami Keterbukaan Informasi	80 Orang	174.111.000	
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK		Persentase Indikator SPBE yang terpenuhi	75 Persen	12.110.429.585	PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK		Persentase Indikator SPBE yang terpenuhi	75 Persen	12.110.429.585	
1.	Penyusunan Kebijakan Internal Layanan SPBE	Pekanbaru	Jumlah Regulasi atau Kebijakan SPBE	4 Peraturan	229.011.000	Penyusunan Kebijakan Internal Layanan SPBE	Pekanbaru	Jumlah Regulasi atau Kebijakan SPBE	4 Peraturan	229.011.000	
2.	Pengembangan E-Government Provinsi Riau	Pekanbaru	Layanan Aplikasi Generik dan Non Generik	4 Aplikasi	794.228.000	Pengembangan E-Government Provinsi Riau	Pekanbaru	Layanan Aplikasi Generik dan Non Generik	4 Aplikasi	794.228.000	
3.	Pengelolaan Multimedia dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Multimedia dan Dokumentasi yang dihasilkan	300 Kali	2.230.959.885	Pengelolaan Multimedia dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Multimedia dan Dokumentasi yang dihasilkan	300 Kali	2.230.959.885	
4.	Pembinaan PPID Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah OPD yang dibina	40 OPD Pemprov	386.593.600	Pembinaan PPID Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah OPD yang dibina	40 OPD Pemprov	386.593.600	

				dan Kab/Kota					dan Kab/Kota		
5.	Penyebarluasan Informasi	Pekanbaru	Jumlah Informasi yang disebarluaskan	11680 Kali	865.851.400	Penyebarluasan Informasi	Pekanbaru	Jumlah Informasi yang disebarluaskan	11680 Kali	865.851.400	
6.	Pengelolaan Data dan Interoperabilitas Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Web API yang terintegrasi dan berbagi pakai	30 Web API	252.356.000	Pengelolaan Data dan Interoperabilitas Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Web API yang terintegrasi dan berbagi pakai	30 Web API	252.356.000	
7.	Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Sengketa Informasi Yang ditangani	40 sengketa	1.704.342.600	Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Sengketa Informasi Yang ditangani	40 sengketa	1.704.342.600	
8.	Penguatan Kelembagaan KIP serta kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Provinsi Riau	Jumlah Masyarakat dan Aparatur Pemdes	1800 orang	1.499.487.100	Penguatan Kelembagaan KIP serta kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Provinsi Riau	Jumlah Masyarakat dan Aparatur Pemdes	1800 orang	1.499.487.100	
9.	Pengelolaan Bandwith Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau	Pekanbaru	Volume Bandwith yang disediakan	500 MBPS	4.147.600.000	Pengelolaan Bandwith Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau	Pekanbaru	Volume Bandwith yang disediakan	500 MBPS	4.147.600.000	
	STATISTIK				663.700.000	STATISTIK				663.700.000	
VI.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK		Persentase Data Sektoral Yang Tersusun	75 Persen	663.700.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK		Persentase Data Sektoral Yang Tersusun	75 Persen	663.700.000	
1.	Pembinaan Penyelenggaraan Data Sektoral dan Spasial	Pekanbaru	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	129.833.200	Pembinaan Penyelenggaraan Data Sektoral dan Spasial	Pekanbaru	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	129.833.200	
2.	Identifikasi, Sinkronisasi, Integrasi data Sektoral Pemerintah Daerah Se-Provinsi Riau	Kab/kota Se Provinsi Riau	Jumlah data Sektoral yang terkumpul	3100 data	308.791.800	Identifikasi, Sinkronisasi, Integrasi data Sektoral Pemerintah Daerah Se-Provinsi Riau	Kab/kota Se Provinsi Riau	Jumlah data Sektoral yang terkumpul	3100 data	308.791.800	
3.	Update dan Pengolahan Data Sektoral Pemerintah Daerah se Provinsi Riau	Kab/kota Se Provinsi Riau	Jumlah Data Sektoral yang diolah	3100 data	225.075.000	Update dan Pengolahan Data Sektoral Pemerintah Daerah se Provinsi Riau	Kab/kota Se Provinsi Riau	Jumlah Data Sektoral yang diolah	3100 data	225.075.000	
	PERSANDIAN				736.860.000	PERSANDIAN				736.860.000	

V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN		Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	75 Persen	736.860.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN		Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	75 Persen	736.860.000	
1.	Tata Kelola Keamanan Informasi	Provinsi Riau	Jumlah Prasarana Persandian yang ditata/dikelola	25 paket	408.736.000	Tata Kelola Keamanan Informasi	Provinsi Riau	Jumlah Prasarana Persandian yang ditata/dikelola	25 paket	408.736.000	
2.	Pengembangan Layanan Kemanan Informasi	Provinsi Riau	Jumlah Layanan dan Prasarana Kemanan Informasi yang dikembangkan	36 titik	224.594.000	Pengembangan Layanan Kemanan Informasi	Provinsi Riau	Jumlah Layanan dan Prasarana Kemanan Informasi yang dikembangkan	36 titik	224.594.000	
3.	Pengawasan dan Evaluasi Kemanan Informasi	Pemerintah Provinsi dan kab.Kota Se Provinsi Riau	Frekuensi Pengawasan dan Evaluasi Kemanan Informasi	1 dokumen	103.530.000	Pengawasan dan Evaluasi Kemanan Informasi	Pemerintah Provinsi dan kab.Kota Se Provinsi Riau	Frekuensi Pengawasan dan Evaluasi Kemanan Informasi	1 dokumen	103.530.000	
J U M L A H					17.124.577.030					17.124.577.030	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Hal ini berguna untuk menjaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan kepentingan terkait pelayanan OPD. Dalam konteks itulah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau mengakomodir usulan – usulan program / kegiatan dari masyarakat, dan para pemangku kepentingan sesuai dengan isu – isu strategis dalam penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika. Adapun usulan program dan kegiatan yang telah diakomodir oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau berdasarkan penelitian lapangan, surat-surat permohonan pemasangan jaringan internet yang diterima oleh Dinas.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau mengikuti rangkaian mekanisme perencanaan pembangunan, salah satunya forum konsultasi publik. Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan.

Melalui forum konsultasi tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis,

oleh karena itu forum konsultasi dilaksanakan secara terbuka dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi/ perguruan tinggi, LSM dan OPD di Provinsi. Dari hasil forum konsultasi tersebut, berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan lebih terkait pada pelayanan publik di sektor-sektor pembangunan.

Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, tidak terdapat usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Tabel 2.5. Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Provinsi Riau Tahun 2020

Nama OPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

Selain usulan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau juga menangani Komisi Informasi, yang sebelumnya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sekarang bergabung di bawah Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Komisi Informasi Publik adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik disingkat dengan UU-KIP (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik). Tepatnya pada Bab VII UUKIP mengatur

tentang fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab Komisi Informasi serta tata cara pembentukan, proses rekrutment Komisi Informasi dari tingkat pusat hingga Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, dan wakil Ketua merangkap anggota serta 3 orang anggota-anggotanya.

Komisi Informasi Provinsi adalah lembaga mandiri di tingkat Provinsi yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan adjudikasi nonlitigasi di masing-masing provinsi.

Sesuai dengan pasal 33 UU-KIP bahwa Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4(empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Tugas dari Komisi Informasi yakni melakukan penyelesaian sengketa informasi, Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang

bersengketa; meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2020 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Tema yang diangkat adalah “mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing, perekonomian kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”. Pencapaian sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 yang mengambil tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 adalah RKP tahun kelima pelaksanaan RPJMN V (2019-2024), memuat program dan kegiatan yang bersifat rutin, program dan kegiatan yang bersifat multiyear atau on-going, memuat program yang menjadi pijakan kokoh untuk memudahkan pekerjaan Pemerintah selanjutnya, yang mendapat mandat untuk memimpin Indonesia.

Adapun arah kebijakan dan prioritas strategi RPJMN 2020-2024 Bidang Komunikasi adalah Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik melalui strategi :

- a. Penguatan integrasi tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik.
- b. Penguatan media-media lokal dan alternatif sebagai sumber informasi utama masyarakat.
- c. Penyediaan konten informasi publik yang berkualitas dan merata, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T.
- d. Peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi.
- e. Peningkatan akses partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik secara langsung dan digital.
- f. Peningkatan literasi media masyarakat melalui pendidikan dan pendekatan sosial budaya.
- g. Penyusunan standarisasi lembaga pers dan jurnalis.
- h. Peningkatan kualitas isi siaran TV melalui pembentukan rating nasional serta penguatan peran Komisi Penyiaran Indonesia.

Adapun Tema RPJMN V (2020-2024) adalah :

"Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan."

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2020-2024 adalah:

"Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk sinergitas program dan kegiatan pemerintah Provinsi, khususnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada tahun 2020, disusunlah rencana kerja tahunan untuk tahun 2020 yang bertujuan untuk mewujudkan program pembangunan sesuai dengan visi dan misi Gubernur Riau.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau 2020.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun Tujuan Renja Diskominfo Provinsi Riau Tahun 2020 adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2020 bagi setiap bagian/bidang di lingkungan Diskominfo Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Riau;
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksana program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

Adapun Sasaran Renja Diskominfo Provinsi Riau Tahun 2020 adalah :

1. Optimalnya peran komunikasi dan informatika dalam pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Riau yang termuat dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2020-2024 sehingga terjadi sinergitas Tupoksi Diskominfo selaku pengelola komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian dengan RPJMD Provinsi Riau serta Renstra Diskominfo Provinsi Riau;
2. Tersusunnya program dan kegiatan dokumen perencanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2020.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Dalam proses rencana kerja, Diskominfo Provinsi Riau mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan

Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja.

Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Diskominfo Provinsi Riau untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (*benchmarks*) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Mengacu pada tema pembangunan Provinsi Riau, faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja tahun 2020 pada Diskominfo Provinsi Riau berkaitan dengan pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Riau, yakni Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi.

Untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang diberikan kepada Diskominfo Provinsi Riau, disusunlah sasaran yang akan menunjang tujuan, yakni:

1. Tersedianya Kebijakan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informatika;
2. Meningkatnya Tata Kelola SPBE
3. Meningkatnya Layanan SPBE
4. Meningkatnya Pengamanan SPBE
5. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral dan Spasial

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 55/SE/2019, Tanggal 26 Maret 2019 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, bahwa Pagu Indikatif Belanja Langsung Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2019 adalah sebesar Rp.9.358.128.330,12,-

Dari pagu yang diberikan untuk melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020, dirasakan sangat kurang karena untuk fasilitas bandwidth/internet dilaksanakan 1 pintu yang berpusat di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dan memerlukan biaya lebih kurang 4 milyar rupiah lebih atau mendekati setengah dari pagu yang diberikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dilakukan pembahasan untuk mencari solusi penambahan dana untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, dan didapati kesepakatan pagu tahun 2020 menjadi Rp.17.124.577.030,- Anggaran dana ini termasuk program dan kegiatan Komisi Informasi Provinsi Riau yang struktur organisasinya berada di bawah naungan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Program-Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2020 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika
5. Program Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Program Penyelenggaraan Statistik
7. Program Peningkatan Penyelenggaraan Persandian

Akibat adanya penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun 2020 yang berdampak pada penganggaran untuk program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah provinsi Riau melakukan rapat pembahasan RAPBD Provinsi Riau untuk Tahun 2020 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), disimpulkan agar semua kepala organisasi perangkat daerah melakukan rasionalisasi atau pengurangan anggaran.

Berkenaan dengan rasionalisasi dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau juga melakukan pengurangan anggaran sehingga didapat jumlah pagu anggaran untuk tahun 2020 menjadi Rp.16.219.182.830,- untuk Belanja Langsung dan Rp.15.357.767.148,12,- untuk Belanja Tidak Langsung, sehingga total anggaran menjadi Rp.31.576.949.978,12,-

Adapun rincian rencana kegiatan per program serta indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2020 seperti terlihat pada tabel berikut :

**TABEL 3. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK PROVINSI RIAU TAHUN 2020**

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.10.01.0.	NON URUSAN				2.085.192.445				4.121.000.000
1.2.10.01.0.0.	NON URUSAN				2.085.192.445				4.121.000.000
1.2.10.01.0.0.00.	NON URUSAN				2.085.192.445				4.121.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 Persen	1.795.192.445			100 Persen	3.696.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	Pekanbaru	160 Surat	10.000.000	APBD		200 Surat	15.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	Kota Pekanbaru	2 Rekening	6.000.000	APBD		2 Rekening	531.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Pekanbaru	16 Unit	142.200.000	APBD		20 Unit	250.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Pekanbaru	12 Bulan	75.000.000	APBD		12 Bulan	200.000.000
1.2.10.01.0.0.00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	pekanbaru	18 Unit	200.000.000	APBD		18 Unit	300.000.000

1.2.10.01.0.0.00.0 1.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	Kota pekanbaru	37 Jenis	200.000.000	APBD		40 Jenis	250.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.008.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Kota Pekanbaru	22 Jenis	15.606.580	APBD		25 Jenis	250.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Pekanbaru	10 Jenis	25.000.000	APBD		10 Jenis	200.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.010.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	kota pekanbaru	9500 Porsi	183.720.000	APBD		9500 Porsi	250.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Riau	160 Kali	689.984.115	APBD		160 Kali	850.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	48 OB	168.000.000	APBD		48 OB	400.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.033.	Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Peserta Harkitnas	Dinas Kominfotik Provinsi Riau	1000 orang	58.251.750	APBD		1000 orang	0
1.2.10.01.0.0.00.0 1.037.	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Provinsi Riau dan kab/kota se-Provinsi Riau	100 Persen	21.430.000	APBD		100 Persen	200.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100 Persen	220.000.000,00			100 Persen	355.000.000,00
1.2.10.01.0.0.00.0 2.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	Kota Pekanbaru	4 Ruang	55.000.000	APBD		4 Ruang	55.000.000

1.2.10.01.0.0.00.0 2.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	kota pekanbaru	142 Unit	165.000.000	APBD		138 Unit	300.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Tingkat Kehadiran ASN		100 Persen	70.000.000			100 Persen	70.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 3.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Pekanbaru	100 Stel	70.000.000	APBD		100 Stel	70.000.000
1.2.10.01.1.	URUSAN WAJIB				14.133.990.385				18.449.933.997
1.2.10.01.1.2.	WAJIB NON PELAYANAN DASAR				14.133.990.385				18.449.933.997
1.2.10.01.1.2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12.939.008.385				17.050.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 5.	PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Sistem Informasi dan Aplikasi yang dikelola		75 Persen	805.903.000			80 Persen	1.300.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 5.002.	Pegelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan dan Data Center	Jumlah Data Center yang Dikelola	Kota Pekanbaru	11 unit	299.488.000	APBD		11 unit	450.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 5.003.	Pengelolaan dan Pengembangan Command Center	Jumlah Command Center yang dikelola	Kota Pekanbaru	1 Unit	332.304.000	APBD		1 Unit	450.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 5.004.	Pembinaan Kemitraan Kelompok Informasi Masyarakat dan Pelibatan Komunitas Masyarakat dalam Keterbukaan Informasi	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Memahami Keterbukaan Informasi	12 Kabupaten Kota	80 Orang	174.111.000	APBD		120 Orang	400.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.	PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	Persentase Indikator SPBE yang terpenuhi		75 Persen	12.133.105.385			80 Persen	15.750.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.001.	Penyusunan Kebijakan Internal Layanan SPBE	Jumlah Regulasi atau Kebijakan SPBE	Pekanbaru	4 Peraturan	229.011.000	APBD		4 Peraturan	400.000.000

1.2.10.01.1.2.10.1 6.003.	Pengembangan E-Government Provinsi Riau	Layanan Aplikasi Generik dan Non Generik	Pekanbaru	4 Aplikasi	794.228.000	APBD		4 Aplikasi	2.500.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.004.	Pengelolaan Multimedia dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Multimedia dan Dokumentasi yang dihasilkan	Provinsi Riau	300 Kali	2.292.959.885	APBD		400 Kali	1.500.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.005.	Pembinaan PPID Provinsi Riau	Jumlah OPD yang dibina	Pekanbaru	40 OPD Pemprov dan Kab/Kota	431.473.600	APBD		40 OPD Pemprov dan Kab/Kota	550.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.006.	Penyebarluasan Informasi	Jumlah Informasi yang disebarluaskan	Pekanbaru	11680 Kali	865.851.400	APBD		11680 Kali	800.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.007.	Pengelolaan Data dan Interoperabilitas Provinsi Riau	Jumlah Web API yang terintegrasi dan berbagi pakai	Provinsi Riau	30 Web API	228.612.000	APBD		30 Web API	500.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.008.	Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau	Jumlah Sengketa Informasi Yang ditangani	Provinsi Riau	40 sengketa	1.643.882.400	APBD		40 sengketa	0
1.2.10.01.1.2.10.1 6.009.	Penguatan Kelembagaan KIP serta kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Jumlah Masyarakat dan Aparatur Pemdes	Provinsi Riau	1800 orang	1.499.487.100	APBD		1800 orang	2.500.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.010.	Pengelolaan Bandwith Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau	Volume Bandwith yang disediakan	Pekanbaru	500 MBPS	4.147.600.000	APBD		1200 MBPS	7.000.000.000
1.2.10.01.1.2.14.	STATISTIK				582.970.000				949.999.997
1.2.10.01.1.2.14.1 5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK	Persentase Data Sektoral Yang Tersusun		75 Persen	582.970.000			80 Persen	949.999.997
1.2.10.01.1.2.14.1 5.004.	Pembinaan Penyelenggaraan Data Sektoral dan Spasial	Jumlah Dokumen	Pekanbaru	1 Dokumen	129.833.200	APBD		1 Dokumen	349.999.997
1.2.10.01.1.2.14.1 5.005.	Identifikasi, Sinkronisasi, Integrasi data Sektoral Pemerintah Daerah Se-Provinsi Riau	Jumlah data Sektoral yang terkumpul	Kab/kota Se Provinsi Riau	3100 data	228.061.800	APBD		3200 data	350.000.000
1.2.10.01.1.2.14.1 5.006.	Update dan Pengolahan Data Sektoral Pemerintah Daerah se Provinsi Riau	Jumlah Data Sektoral yang diolah	Kab/kota Se Provinsi Riau	3100 data	225.075.000	APBD		3200 data	250.000.000

1.2.10.01.1.2.15.1.2.10.01.1.2.15.1.5.	PERSANDIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi		75 Persen	612.012.000 612.012.000			80 Persen	449.934.000 449.934.000
1.2.10.01.1.2.15.1.5.005.	Tata Kelola Keamanan Informasi	Jumlah Prasarana Persandian yang ditata/dikelola	Provinsi Riau	25 paket	384.736.000	APBD		25 paket	74.140.000
1.2.10.01.1.2.15.1.5.006.	Pengembangan Layanan Kemanan Informasi	Jumlah Layanan dan Prasarana Kemanan Informasi yang dikembangkan	Provinsi Riau	36 titik	184.736.000	APBD		36 titik	224.594.000
1.2.10.01.1.2.15.1.5.007.	Pengawasan dan Evaluasi Kemanan Informasi	Frekuensi Pengawasan dan Evaluasi Kemanan Informasi	Pemerintah Provinsi dan kab.Kota Se Provinsi Riau	1 dokumen	78.540.000	APBD		1 dokumen	151.200.000
J U M L A H					16.219/182.830				22.570.933.997

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Riau tertuang dalam Rencana Program dan kegiatan Prioritas Daerah seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.1 (Tabel T- C.33.)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Provinsi Riau

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tahun Rencana)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.10.01.0.0.00.0 1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 Persen	1.795.192.445			100 Persen	3.696.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	Pekanbaru	160 Surat	10.000.000	APBD		200 Surat	15.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	Kota Pekanbaru	2 Rekening	6.000.000	APBD		2 Rekening	531.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Pekanbaru	16 Unit	142.200.000	APBD		20 Unit	250.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Pekanbaru	12 Bulan	75.000.000	APBD		12 Bulan	200.000.000
1.2.10.01.0.0.00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	pekanbaru	18 Unit	200.000.000	APBD		18 Unit	300.000.000

1.2.10.01.0.0.00.0 1.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	Kota pekanbaru	37 Jenis	200.000.000	APBD		40 Jenis	250.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.008.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Kota Pekanbaru	22 Jenis	15.606.580	APBD		25 Jenis	250.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Pekanbaru	10 Jenis	25.000.000	APBD		10 Jenis	200.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.010.	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	kota pekanbaru	9500 Porsi	183.720.000	APBD		9500 Porsi	250.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Riau	160 Kali	689.984.115	APBD		160 Kali	850.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	Pekanbaru	48 OB	168.000.000	APBD		48 OB	400.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 1.033.	Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Peserta Harkitnas	Dinas Komunikasi, Informatika, dan statistik Provinsi Riau	1000 orang	58.251.750	APBD		1000 orang	0
1.2.10.01.0.0.00.0 1.037.	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Provinsi Riau dan kab/kota se- Provinsi Riau	100 Persen	21.430.000	APBD		100 Persen	200.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100 Persen	220.000.000			100 Persen	355.000.000

1.2.10.01.0.0.00.0 2.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	Kota Pekanbaru	4 Ruang	55.000.000	APBD		4 Ruang	55.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 2.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	kota pekanbaru	142 Unit	165.000.000	APBD		138 Unit	300.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Tingkat Kehadiran ASN		100 Persen	70.000.000			100 Persen	70.000.000
1.2.10.01.0.0.00.0 3.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Pekanbaru	100 Stel	70.000.000	APBD		100 Stel	70.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 5.	PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Sistem Informasi dan Aplikasi yang dikelola		75 Persen	805.903.000			80 Persen	1.300.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 5.002.	Pegelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan dan Data Center	Jumlah Data Center yang Dikelola	Kota Pekanbaru	11 unit	299.488.000	APBD		11 unit	450.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 5.003.	Pengelolaan dan Pengembangan Command Center	Jumlah Command Center yang dikelola	Kota Pekanbaru	1 Unit	332.304.000	APBD		1 Unit	450.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 5.004.	Pembinaan Kemitraan Kelompok Informasi Masyarakat dan Pelibatan Komunitas Masyarakat dalam Keterbukaan Informasi	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Memahami Keterbukaan Informasi	12 Kabupaten Kota	80 Orang	174.111.000	APBD		120 Orang	400.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.	PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	Persentase Indikator SPBE yang terpenuhi		75 Persen	12.133.105.385			80 Persen	15.750.000.000

1.2.10.01.1.2.10.1 6.001.	Penyusunan Kebijakan Internal Layanan SPBE	Jumlah Regulasi atau Kebijakan SPBE	Pekanbaru	4 Peraturan	229.011.000	APBD		4 Peraturan	400.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.003.	Pengembangan E-Government Provinsi Riau	Layanan Aplikasi Generik dan Non Generik	Pekanbaru	4 Aplikasi	794.228.000	APBD		4 Aplikasi	2.500.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.004.	Pengelolaan Multimedia dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Multimedia dan Dokumentasi yang dihasilkan	Provinsi Riau	300 Kali	2.292.959.885	APBD		400 Kali	1.500.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.005.	Pembinaan PPID Provinsi Riau	Jumlah OPD yang dibina	Pekanbaru	40 OPD Pemprov dan Kab/Kota	431.473.600	APBD		40 OPD Pemprov dan Kab/Kota	550.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.006.	Penyebarluasan Informasi	Jumlah Informasi yang disebarluaskan	Pekanbaru	11680 Kali	865.851.400	APBD		11680 Kali	800.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.007.	Pengelolaan Data dan Interoperabilitas Provinsi Riau	Jumlah Web API yang terintegrasi dan berbagi pakai	Provinsi Riau	30 Web API	228.612.000	APBD		30 Web API	500.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.008.	Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau	Jumlah Sengketa Informasi Yang ditangani	Provinsi Riau	40 sengketa	1.643.882.400	APBD		40 sengketa	0
1.2.10.01.1.2.10.1 6.009.	Penguatan Kelembagaan KIP serta kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Jumlah Masyarakat dan Aparatur Pemdes	Provinsi Riau	1800 orang	1.499.487.100	APBD		1800 orang	2.500.000.000
1.2.10.01.1.2.10.1 6.010.	Pengelolaan Bandwith Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Prov Riau	Volume Bandwith yang disediakan	Pekanbaru	500 MBPS	4.147.600.000	APBD		1200 MBPS	7.000.000.000
1.2.10.01.1.2.14.1 5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK	Persentase Data Sektoral Yang Tersusun		75 Persen	582.970.000			80 Persen	949.999.997
1.2.10.01.1.2.14.1 5.004.	Pembinaan Penyelenggaraan Data Sektoral dan Spasial	Jumlah Dokumen	Pekanbaru	1 Dokumen	129.833.200	APBD		1 Dokumen	349.999.997
1.2.10.01.1.2.14.1 5.005.	Identifikasi, Sinkronisasi, Integrasi data Sektoral Pemerintah Daerah Se- Provinsi Riau	Jumlah data Sektoral yang terkumpul	Kab/kota Se Provinsi Riau	3100 data	228.061.800	APBD		3200 data	350.000.000

1.2.10.01.1.2.14.1 5.006.	Update dan Pengolahan Data Sektoral Pemerintah Daerah se Provinsi Riau	Jumlah Data Sektoral yang diolah	Kab/kota Se Provinsi Riau	3100 data	225.075.000	APBD		3200 data	250.000.000
1.2.10.01.1.2.15.1 5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi		75 Persen	736.860.000			80 Persen	449.934.000
1.2.10.01.1.2.15.1 5.005.	Tata Kelola Keamanan Informasi	Jumlah Prasarana Persandian yang ditata/dikelola	Provinsi Riau	25 paket	348.736.000	APBD		25 paket	74.140.000
1.2.10.01.1.2.15.1 5.006.	Pengembangan Layanan Kemanan Informasi	Jumlah Layanan dan Prasarana Kemanan Informasi yang dikembangkan	Provinsi Riau	36 titik	184.736.000	APBD		36 titik	224.594.000
1.2.10.01.1.2.15.1 5.007.	Pengawasan dan Evaluasi Kemanan Informasi	Frekuensi Pengawasan dan Evaluasi Kemanan Informasi	Pemerintah Provinsi dan kab.Kota Se Provinsi Riau	1 dokumen	78.540.000	APBD		1 dokumen	151.200.000
J U M L A H					16.219.182.830				22.570.933.997

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika di Pemerintah Daerah Riau. Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran Diskominfo Provinsi Riau untuk melakukan pengelolaan dan penataan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Provinsi Riau, maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodir berbagai perubahan/dinamika yang terjadi.

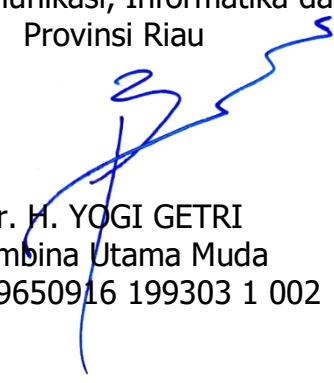
Untuk dapat meningkatkan kinerja diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan ketersediaan anggaran serta adanya komitmen pemangku kepentingan dan personil Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau serta didukung segenap *stakeholders* yang ada.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dokumen Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang. Semoga

Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik.

Pekanbaru, 2019

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Riau



Ir. H. YOGI GETRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199303 1 002